

Constitutional Court Ruling 35/PUU-X/2012, 16th May 2013 (Judicial Review of articles in Forestry Law 41/1999) ⁱ				
What was changed	Original Indonesian wording in Law 41/1999	English (unofficial)	Indonesian revision by Constitutional Court's (stated or implied in 35/PUU-X/2012, 16th May)	English revision (unofficial)
Article 1.6	Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	"Adat" forests are state forests located in indigenous peoples' territories.	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	"Adat" forests are forests located in indigenous peoples' territories.
Article 4.3	Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.	Forest control by the state shall respect the rights of indigenous peoples, as long as they exist and their existence is recognized, and does not contradict national interests.	Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.	Forest control by the state shall respect the rights of indigenous peoples, as long as they remain in existence and are compatible with societal development, and with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia as regulated by law.
Article 5.1	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak.	Forest status consists of two types: a. state forest, and b. forest subject to rights	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat	State forest as referred to in paragraph (1) point a, does not include adat forest.
Article 5.2	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.	State forest as referred to in paragraph (1) point a, can be in the form of "adat" forest.	[deleted]	[deleted]
Article 5.3	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	The Government shall determine the status of forest as referred to in paragraph (1) and paragraph (2); and adat forest shall be determined as long as the indigenous peoples concerned remain in existence and their existence is recognised.	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	The Government shall determine the status of forest as referred to in paragraph (1); and adat forest shall be determined as long as the indigenous peoples concerned remain in existence and their existence is recognised.

ⁱ Thanks to Marcus Colchester and Noer Fauzi Rachman for their help with compiling this table.